

ARTIKEL

**PERANAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA DI KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA**

*THE ROLE OF INSTITUTIONS INSTITUTE AS THE ALTERNATIVE
INSTITUTION OF CULTURAL RELEASE IN THE INDONESIAN LEGAL
SYSTEM IN DONGGO DISTRICT BIMA DISTRICT*

MUSMULYADIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018**



**PERANAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENANGGULANGAN
KEJAHATAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DI KECAMATAN DONGGO
KABUPATEN BIMA**

MUSMULYADIN

Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Hukum Dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar
Email: musmulyadin42@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendeskripsikan (i) peranan lembaga adat sebagai lembaga alternatif penanggulangan kejahatan dalam sistem hukum Indonesia di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (ii) Upaya mempertahankan eksistensi lembaga adat sebagai lembaga alternatif penanggulangan kejahatan dalam sistem hukum Indonesia di kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat di kecamatan Donggo masih dipertahankan, masyarakat kecamatan Donggo kabupaten Bima menghormati hukum adatnya hingga saat ini sehingga dalam penanggulangan kejahatan dapat di atasi oleh adat, dalam peranan LASDO memberikan sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dengan maksud agar dalam kehidupan masyarakat dapat dikembalikan. Upaya untuk mempertahankan eksistensi lembaga adat, LASDO dan masyarakat sama-sama menjaga dan mempertahankan tradisi dengan sistem kekeluargaan dan sistem kegotongroyongan yang telah berkembang selama ini.

Oleh karena itu dalam penanggulangan kejahatan Agar lembaga adat dan syariat Donggo (LASDO) terus meningkatkan peranannya sebagai lembaga alternatif dalam penanggulangan kejahatan sehingga keseimbangan dalam masyarakat tetap terjaga dan dalam mempertahankan eksistensi lembaga adat dan syariat diharapkan dapat meningkatkan hubungan sistem kekerabatan dengan terus menjaga silaturahmi dan mengedepankan sistem kegotongroyongan.

Kata Kunci: Lembaga adat, penanggulangan kejahatan, sistem hukum

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mendapat pengakuan dan penghormatan, termaktub dalam Pasal 18B ayat 2. Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Terdapat tiga unsur untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: Masyarakat adatnya masih hidup, Sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama bahkan masih hidup di tengah-tengah masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat hukum tersebut dengan hak-hak tradisionalnya itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menegakkan negara sendiri mengingat masyarakat hukum adat tersebut sangat besar dan berlainan dengan masyarakat hukum adat di daerah lainnya.

Pengakuan dan penghormatan negara tersebut justru dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan peraturan tersebut hukum adat, tumbuh, dianut, dan dipertahankan sebagaimana peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia dalam sebuah masyarakat, supaya dapat dihindarkan segala bentuk ancaman dan kejahatan. Kejahatan yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik yang kelihatan maupun yang tidak terlihat, hukum adat ditaati oleh kehidupan masyarakat dengan melihat keadaan yang ada dikecamatan Donggo kabupaten Bima, hukum adat masih dipertahankan oleh masyarakat tersebut.

Kehidupan ini lebih dinamis karena adanya kejahatan. Tanpa adanya kejahatan, masyarakat tidak akan maju, tidak kritis, tidak kreatif dan inovatif. Namun demikian setiap masalah kejahatan yang timbul dalam kehidupan manusia

dan memiliki eksese yang mengganggu keharmonisan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Persoalan Kejahatan akan selalu muncul di dalam kehidupan sosial, menurut plato (427-347 s.m.) menyatakan dalam bukunya ‘Republiek’ bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Oleh karena itu di butuhkan lembaga-lembaga yang mampu menanggulangi kejahatan selain lembaga kepolisian, seperti halnya hadirnya lembaga adat, lembaga yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Tindak pidana kejahatan kini semakin dirasakan dan mengganggu kenyamanan dalam kehidupan masyarakat sehingga lembaga-lembaga seperti lembaga kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menindak lanjuti setiap tindak kejahatan. Bahkan beberapa pencegahan sudah diadakan akan tetapi kejahatan masih saja terjadi di mana sepanjang ada masyarakat. Oleh karena itu bersama-sama semua lembaga ikut berkontribusi mengatasi setiap persoalan kejahatan, serta lembaga adat sebagai lembaga alternatif menanggulangi kejahatan.

Kejahatan menurut Kartono (Barda Nawawi :1998. Hal. 2) bahwa : “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.” “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana)”

Hukum adat merupakan salah-satu bentuk hukum yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu di ketahui bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini. Sehingga perlu Hukum adat untuk sama-sama mencegah dan

menanggulangi kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Hardjito Notopuro yang di kutip dalam bukunya (Dewi Wulansari, 2010:4-6) menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Dari apa yang penulis kemukakan diatas, merupakan suatu kajian yang menarik dan perlu untuk diadakan suatu penelitian” Peranana Lembaga adat sebagai lembaga alternatif penanggulangan kejahatan dalam sistem hukum Indonesia di kecamatan Donggo kabupaten Bima”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji sejauhmana peranan lembaga adat Donggo dalam upaya penanggulangan kejahatan di kecamatan Donggo Kabupaten Bima dan untuk mengkaji upaya untuk mempertahankan Eksistensi Lembaga Adat Donggo sebagai Lembaga Alternatif Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima untuk memperoleh data dan informasi yang aktual tentang Peranan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penanggulangan Kejahatan.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Sosio Yuridis, yaitu penelitian hukum langsung di masyarakat, dengan memandang hukum sebagai fenomena sosial. Data-data Valid yang diperlukan digali langsung dari kepala Adat setempat dan beberapa informan lainnya. Penelitian ini juga didukung dengan bahan-bahan Hukum Primer, Sekunder maupun Tersier, yaitu; Referensi yang berkaitan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan dokumen lainnya, serta Kamus dan Ensiklopedia.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus penelitian

Untuk menghindari terjadinya persepsi yang berbeda-beda terhadap fokus yang akan diteliti, maka peneliti menentukan fokus

penelitian pada Peranan Lembaga adat dalam Penanggulangan Kejahatan Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca maka fokus yang dikaji dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. Peranan lembaga Adat Donggo sebagai lembaga alternatif penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan donggo kabupaten Bima.
2. Upaya untuk mempertahankan eksistensi lembaga adat Donggo dalam penanggulangan kejahatan di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

D. Sumber Data dan Informan Penelitian

a. Sumber Data

Pada dasarnya terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian itu yaitu:

1. Data primer

Data yang bersumber dan diperoleh langsung dari informan melalui (1) Observasi yakni dengan mengamati secara langsung objek penelitian kemudian mencatat peristiwa yang penting yang berkaitan dengan pembahasan, (2) *Intervie* (wawancara) yakni penulis mengadakan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur yang diajukan kepada informan (Kepala Adat, lembaga kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat).

2. Data sekunder

Data Sekunder, dimana data yang diambil dari bahan-bahan Hukum Primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan dokumentasi berupa dokumen-dokumen penuntun sanksi adat, sertifikat Aliansi masyarakat Adat.

b. Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri dari informan utama dan informan biasa yang dilakukan secara *purposivesampling*.

Informan utama (*key informant*) yaitu Kepala Adat (Ompu Tua), sedangkan Informan biasa yaitu Lembaga kepolisian dan tokoh masyarakat, serta masyarakat.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai pewawancara. Sebagai peneliti dan instrumen utama maka mulai dari perencanaan, pengumpulan, dan analisis data hingga penulisan laporan penelitian seluruhnya dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan arahan dan petunjuk komisi penasihat/pembimbing.

Peneliti sebagai instrumen memperhatikan ciri-ciri umum yang berlandaskan diri atas pengetahuan, memproses, dan menganalisis data secepatnya guna mengambil kesimpulan terhadap data yang diperoleh dan memanfaatkan kesempatan mencari respon berikut (untuk memperoleh penguatan, perubahan dan perbaikan).

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian dimana peneliti sendiri sebagai instrumen, digunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, dan observasi dan catatan/telaah dokumen. Selain itu, digunakan rekaman peristiwa seperti alat perekam dan alat pemotret yang dapat mengabadikan kenyataan yang berkaitan dengan perhatian peneliti ini. Penggunaan alat bantu yang disebut terakhir ini terbatas penggunaannya, mengingat bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian yang memungkinkan dapat direkam dengan bebas, melainkan harus seizin subjek atau informan terlebih dahulu.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Pengabsahan Data

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan penting dalam penelitian. Oleh karena itu mengumpulkan data penelitian harus dirancang dengan baik agar penelitian menghasilkan data yang valid. Untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan yaitu mengamati penyebab kejahatan, peneliti melihat kejahatan terjadi karena kebanyakan anak muda tidak bisa di kontrol oleh orangtuanya sehingga pada pergaulannya melakukan kejahatan seperti setelah minum-minuman keras mereka berpikir setelah habis minumannya tidak lagi uang untuk membeli lagi pasti berpikir untuk mencuri dan akhirnya kejadian itu akan berdampak akan terganggunya kehidupan masyarakat, observasi dilakukan pada tanggal 16 Februari 2018.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepala Adat tentang peranan lembaga adat dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi lembaga adat, serta 8 pertanyaan lain terkait masalah lembaga adat, kemudian dengan masyarakat, 3 pertanyaan tentang keberadaan lembaga adat dan syariat Donggo serta upaya

yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi lembaga adat, dan wawancara dilakukan dengan lembaga kepolisian, 5 pertanyaan terkait masalah lembaga adat dan syariat Donggo serta bagaimana koordinasi antara lembaga adat dan lembaga kepolisian. Dengan waktu yang berbeda pada bulan Februari 2018, menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumen

Dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu petunjuk operasional kegiatan LASDO tentang penyelesaian masalah kejahatan di kecamatan Donggo dan. Dokumen ini dilakukan proses memilah-milah dokumen yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengabsahan data melalui pengecekan dengan triangulasi sumber di lembaga kepolisian dengan 5 (lima) pertanyaan, peneliti dalam temuannya bahwa lembaga kepolisian dan lembaga adat tetap koordinasi untuk menjaga keamanan dalam kehidupan masyarakat serta dalam pemberian sanksi tetap dilakukan penyampaian kepada pihak kepolisian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan primer maupun sekunder dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam pembahasan penelitian akan diuraikan mengenai bagaimana Peranan lembaga adat sebagai lembaga alternatif penanggulangan kejahatan dalam sistem hukum Indonesia Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dan Bagaimana Upaya untuk mempertahankan Eksistensi lembaga adat sebagai lembaga alternatif penanggulangan kejahatan di kecamatan Donggo kabupaten Bima, di uraikan sebagai berikut:

1. Peranan lembaga adat sebagai lembaga alternatif penanggulan kejahatan dalam sistem hukum Indonesia Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Secara sosiologis, lembaga adat diakui masyarakat dan menjadi prioritas dalam mengatur dan menyelesaikan segala persoalan di masyarakat. Penyelesaian melalui lembaga adat lebih efektif, karena suatu lembaga adat tumbuh berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat dan sudah diakui dan dianut secara turun temurun. Hanya saja untuk tetap menjamin kepastian hukum, maka pengaturan sebagai pengakuan masyarakat melalui perundang-undangan tetap diperlukan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan bidang kehidupan yang netral seperti bidang administrasi, pendidikan dan lain-lain. Mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat selalu mengedepankan keharmonisan dan kerukunan sosial. Menjaga kerukunan sosial sangat dihargai dalam kehidupan pedesaan, dan para pelaku informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah. Penyelesaian melalui lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma bersifat longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial.

LASDO berperan dalam penanggulangan kejahatan dengan 2 upaya yaitu:

- a. Upaya Preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau versi mengancam sanksi atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan atau kejahatan terhadap norma dan nilai, usaha ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dalam masyarakat. “Upaya yang dilakukan adat LASDO ada dua upaya yaitu upaya preventif (sebelum) dan upaya represif (sesudah), ketua adat menyatakan bahwa dalam upaya preventif lembaga adat melakukan pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh anggota yang tunjuk khusus oleh kepala adat kepada masyarakat Donggo dan memberitahukan bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi yang berat sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.”
- b. Upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam semua versi menjatuhkan atau membebaskan, sanksi. Upaya ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma

atau perilaku menyimpang, untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, upaya di sini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang atau melakukan kejahatan. “Dalam upaya Represif atau tindakan sesudah dilakukan kejahatan LASDO berupaya memberikan Hukum dengan yang cukup berat dengan tujuan supaya pelaku kejahatan tidak melakukannya lagi, yaitu pelaku di arak keliling dan diberikan denda berupa uang sebesar 750.000 untuk pihak laki-laki dan perempuan sebesar 500.000, serta dipukul ditengah-tengah lapangan dan disaksikan oleh masyarakat dengan alasan kenapa diperberat hukuman ini termasuk denda yang paling banyak adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bukan saja pelaku masyarakat yang ada di kecamatan Donggo tahu bahwa kejahatan dilakukan akan di hukum seberat mungkin supaya masyarakat takut akan melakukan kejahatan. Denda ini akan disimpan untuk keperluan adat termasuk administrasi para anggota bidang kejahatan yang melakukan pemantauan di masyarakat”.

2. Upaya untuk mempertahankan eksistensi lembaga Adat Donggo sebagai lembaga Alternatif penanggulangan Kejahatan Di kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Dari upaya positisasi bahkan sebelum terpositivitasnya kearifan lokal (hukum adat) oleh pemerintah daerah, ada desa-desa yang sudah hilang sama sekali hukum adat, ada juga beberapa segi hukum adat yang merangkak di beberapa desa, walaupun negara tidak menghendakinya hukum adat pasca akuisisi badan hukum sara menjadi yayasan islam, dan juga komunitas masyarakat yang disebut masyarakat Donggo yang sampai saat ini konsisten mempertahankan keberlakuan hukum adat.

Dalam upaya mempertahankan eksistensinya LASDO yaitu dilakukan dengan cara terus menjaga sistem kekerabatan dan kegotorongan yang telah berkembang selama ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam uraian di atas akan dijelaskan secara terperinci, bahwa peranan lembaga adat di kecamatan Donggo Kabupaten Bima:

Bicara masalah peranan lembaga adat yaitu tidak terlepas dari upaya pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Hukum Adat sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Di sinilah pentingnya keberadaan hukum Adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang mahal. Di dalam kenyataan, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa jenis pengendalian. Penggolongan ini menurut kepala Adat yang diterapkan oleh lembaga Adat dan Syariat Donggo yaitu:

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi “mengancam sanksi” atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.

2. Pengendalian Represif

Pengendalian represif merupakan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi “menjatuhkan atau membebaskan, sanksi”. Pengendalian ini

berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma norma sosial.

Menurut Professor Koentjaraningrat (1985:20), terdapat lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu :

- a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
- b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
- c. Mengembangkan rasa malu.
- d. Mengembangkan rasa takut.
- e. Menciptakan sistem hukum.

Kontrol sosial dalam arti mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi (sarana yang lain: pemberian *incentive positif*). Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Ada dua jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan lembaga adat Donggo ini, yaitu :

- a. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
- b. Sanksi yang bersifat ekonomik.

Lembaga Adat Donggo memiliki dua sanksi, diterapkan bersamaan tanpa bisa dipisahkan, misalnya kalau seorang melakukan perzinahan menjatuhkan sanksi psikologik dengan cara arak keliling dan denda, ini berarti bahwa sekaligus terdakwa tersebut dikenai sanksi ekonomik, sanksi psikologik (karena terasakan olehnya adanya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman), dan sanksi ekonomik (karena dilenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan).

Berikut ini adalah cara-cara lembaga adat Donggo yang dapat dilakukan dalam pengendalian sosial masyarakat, yaitu :

- a. Pengendalian Lisan (Pengendalian Sosial Persuasif). Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku.
- b. Pengendalian Simbolik (Pengendalian Sosial Persuasif). Pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, dan tulisan.

Mekanisme dan prosedur menyelesaikan jenis-jenis kejahatan tergantung kejahatan yang dilakukannya seperti perzinahan, menurut lembaga adat dan syariat Donggo perbuatan zina itu diketahui dari 2 sumber yaitu: zina yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan atau petugas LASDO di tiap Dusun/Desa dan zina yang diketahui dari lelaki atau perempuan pezina yang melaporkan diri atau menyerahkan diri kepada LASDO, untuk mekanismenya dalam penyelesaian melalui proses atau tahap-tahap sebagai berikut:

1. Laporan masyarakat dan laporan petugas LASDO di tiap dusun/desa diterima dan dipelajari (dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disimpulkan) oleh tim yang dipimpin ketua koordinator penegak hukum dalam waktu paling lama 8 jam. Kemudian dicek kebenarannya dilapangan oleh sebuah tim yang terdiri paling banyak 3 orang yang kompeten, terpercaya dan adil dari pengurus LASDO yang ditunjuk oleh ketua badan pengayom dan manajemen tingkat desa atau kecamatan. Pengecekan paling lama 12 jam sejak ditugaskan.
2. Apabila hasil pengecekan lapangan menunjukkan kebenaran dan bukti yang nyata, maka kedua tersangka dibawa ke rumah LASDO. Yang membawa pelaku adalah keluarganya sendiri atau petugas LASDO, selama perjalanan kedua pelaku diperlakukan dengan baik dan manusiawi.
3. Tim pemeriksa adalah para ahli adat minimal 3 orang yang terdiri dari seorang ketua dan 2 orang anggota pendamping yang ditunjuk oleh ketua koordinator penegak hukum atau ketua badan pengayom dan manajemen bila ketua koordinator berhalangan.

4. Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan menghadapkan pelaku secara terpisah. Berdasarkan data, informasi dan pengakuan dari pelaku ternyata perbuatannya benar, maka keduanya dijatuhi sanksi masyarakat berupa:

- a. Diarak dari balai LASDO sampai ke ujung kampung dan kembali ke balai LASDO, selama diarak kedua pezina meneriakan kata-kata atau kalimat sebagai berikut: “arak keliling ini mengucapkan kata-kata yang sudah ditentukan oleh adat yaitu “e ringapo dou doho di rasa e aina karawi bunesantika rakarawi nahuke, nahu kasumpahkara watira karawi waliku” (dengarkanlah seluruh warga jangan kalian melakukan perbuatan seperti perbuatan yang saya lakukan ini, dan saya bersumpah tidak akan mengulangnya lagi).
- b. Selesai diarak kedua pezina tersebut di tempatkan ditengah lapangan dengan disaksikan oleh masyarakat, lalu dipukul 100 kali oleh 5 orang algojo masing-masing 20 pukulan dengan rotan pada bagian batas leher hingga kaki.
- c. Pzina laki-laki sebesar 750.000 dan perempuan 250.000, denda tersebut dibayar selesai sidang oleh pezina atau keluarganya.
- d. Selesai pelaksanaan hukuman kedua pelaku diantar pulang oleh keluarga atau petugas LASDO.

Sanksi merupakan penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugrah/hadiah, dan dapat bersifat negatif dalam bentuk hukuman sehingga sanksi pada dasarnya suatu perangsang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sehingga lembaga adat dan syariat Donggo dalam memberikan sanksi yaitu ada dua sanksi denda dan sanksi arak keliling, sedangkan denda disini tergantung kejahatan apa yang dilakukan seperti halnya pencurian ada istilah disana dua kali waru yang artinya dua kali harga yang dicuri, denda ini di kelola oleh lembaga adat dan syariat Donggo dengan pembagian bahwa 10% disetor ke kas daerah, 20% disetor ke kas desa, 10% disetor ke kas kecamatan, 40% disetor ke kas LASDO, dan 20% untuk honor tim pemeriksa. Pengenaan sanksi (negatif) ini merupakan salah satu upaya dari sistem pengendalian sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat tepatnya dikecamatan Donggo untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat,

karena syarat adanya masyarakat adalah ketertiban.

Sanksi adat atau reaksi adat ataupun koreksi adat adalah merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan keseimbangan akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat.

Sanksi merupakan aspek normatif dalam sistem pengendalian sosial masyarakat yang secara sosiologis tidak dapat disamakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Begitu juga pengendalian sosial dapat ditemukan dimana saja di suatu kelompok tertentu keluarga dalam satu rumah, lembaga pemasyarakatan yang menjadi pedoman mengenai apa yang benar dan apa yang salah termasuk etika, adat istiadat, birokrasi dan sebagainya; dalam suatu komunitas masyarakat. Pengendalian sosial yang sifatnya informal lebih tampak efektif misalnya dengan sanksi pengasingan dari pergaulan.

Upaya untuk mempertahankan eksistensi lembaga Adat Donggo sebagai lembaga Alternatif penanggulangan Kejahatan Di kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Hukum adat di Donggo mampu bertahan dengan segala kelenturannya, memiliki sanksi sendiri ketika terjadi pelanggaran, mulai dari dinikahkan secara paksa bagi yang berduan bukan muhrim, penetapan denda dan mengembalikan barang barang yang diterapkan pada hampir semua pelanggaran, baja (arak keliling) adalah jenis hukuman psikis sekaligus fisik dikenakan bagi mereka yang melanggar, baja ini jenis hukuman yang dibarengi dengan denda, besarnya denda ini tergantung kejahatan yang dilakukannya.

Dalam kaitannya dengan kebertahanan hukum adat Bima (khususnya di komunitas masyarakat Donggo), memang pada era reformasi terjadi positivisasi (pembentukan lembaga adat) lewat perautaran daerah oleh pemerintah daerah, namun itu terjadi tingkatan organisasi (struktur) dan di ikuti dengan konsolidasi yang kuat dengan aparat penegak hukum lainnya, serta tidak diikuti dengan political will penganggarannya yang sehat, dan seakan lembaga adat dibiarkan berjalan seadanya. Namun mesikup begitu LASDO tetap dipertahankan eksistensinya.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo syarat eksistensi hukum adat, itu adalah :

a. Sepanjang masih hidup

Hukum adat di beberapa desa di Kabupaten Bima Khususnya kecamatan Donggo masih hidup dan masih berjalan, walaupun sampai saat ini fungsinya semakin berkurang dan tampak kurang maksimal.

b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat

Perkembangan masyarakat yang positif tidak berpengaruh besar pada hukum adat, sebagai contoh jika dalam pemerintahan ada hierarki pemerintahan maka hukum adat mengatakan bahwa selalu ada penyesuaian pemberlakuan hukum terhadap keadaan masyarakat yang selalu berubah.

c. Diatur dalam Undang-undang

Semenjak amandemen UUD 1945 dan mulai berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, celah untuk memberikan keleluasaan bagi desa untuk menentukan hukumnya sendiri sudah sangat terbuka, tinggal sekarang ini adalah bagaimana aplikasinya di tingkat Pemerintahan Daerah itu sendiri, khususnya dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.

Oleh karena itu sesuai syarat diatas bahwa Hukum adat di kecamatan Donggo masih berlaku dan perlunya untuk dipertahankan eksistensi lembaga Adat sebagai lembaga Alternatif penanggulangan kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat eksistensi dan peran lembaga adat dalam penanggulangan kejahatan dalam wawancara oleh ketua Adat (Arifin Janet) dapat dilakukan dengan antara lain:

(1) Kepala adat terlebih dahulu harus memiliki kemampuan dan pemahaman mendalam tentang kebiasaan dan adat istiadat, serta nilai yang dianut dalam masyarakat, (2) para kepala adat harus memahami latar belakang setiap permasalahan dengan baik, sehingga dapat memberikan penyelesaian yang diharapkan oleh para pihak, (3) memberikan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat tentang keberadaan lembaga adat sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam penanggulangan kejahatan , (4) perbaikan struktur kelembagaan secara internal, dan (5) pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua masalah harus dibawa lembaga formal,

melainkan dapat ditempuh dengan berbagai alternatif penanggulangan kejahatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. LASDO berperan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan memberikan berupa sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dengan maksud agar dalam kehidupan masyarakat dapat dikembalikan.
2. Upaya mempertahankan eksistensi lembaga Adat dan syariat Donggo, dilakukan dengan cara terus menjaga sistem kekerabatan dan kegotongroyongan yang telah berkembang selama ini.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran dan masukan untuk tetap berlangsungnya peranan lembaga adat dan eksistensi lembaga adat dan syariat Donggo (LASO) yaitu sebagai berikut:

1. Agar lembaga adat dan syariat Donggo (LASDO) terus meningkatkan peranannya sebagai lembaga alternatif dalam penanggulangan kejahatan sehingga keseimbangan dalam masyarakat tetap terjaga.
2. Kepada masyarakat di kecamatan Donggo dalam mempertahankan eksistensi LASDO diharapkan dapat meningkatkan hubungan sistem kekerabatan dengan terus menjaga silaturahmi dan mengedepankan sistem kegotongroyongan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B.Wiranata, I Gede, 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta:Liberty,1985
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- PPs UNM. 2010. *Pedoman Penyusunan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana UNM*. Universitas Negeri Makassar: PPs UNM.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Santoso Topo,dkk. *Kriminologi*. 2017. PT. Rajagrafindo Persada.